



► INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Jalan di Perumahan Bersubsidi Bahayakan Penghuni

SLEMAN—Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menyampaikan ada prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan bersubsidi yang kurang layak. Salah satu PSU berupa jalan yang memiliki kemiringan lebih dari 30 derajat.

Ketua Tim Kerja Perumahan Formal DPUPKP Sleman, Agung Yuntoro, mengatakan pengembang tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan dan PSU hanya agar bisa mendapat keuntungan dari penjualan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Agung mengaku ada perumahan MBR di Kapanewon Moyudan yang memiliki jalan dengan kondisi kemiringan lebih dari 30 derajat. Jalan yang curam membuat warga tidak nyaman dan mengancam keselamatan diri.

"Pengembang perumahan itu ada yang bagus [profesional] dan kurang bagus. Ada yang memang orientasi semata-mata keuntungan, tidak memperhatikan kenyamanan perumahan. Di situs lapor sleman juga sudah banyak yang mengeluhkan

PERUMAHAN BERSUBSIDI DI BUMI SEMBADA

Nama Perumahan	Alamat	Unit Tersedia	Unit Terjual
• Griya Moyudan Asri	Moyudan, Sumberarum	44 Unit	60 Unit
• Mulia Purnama Residence	Godean, Sidorejo	18 Unit	131 Unit
• Godean Jogja Hills	Godean, Sidorejo	1 Unit	189 Unit
• Graha Kencana Gamplong	Moyudan, Sumberahayu	55 Unit	19 Unit
• Balti Jannati	Balekatur, Gamping	0 Unit	39 Unit
• Perumahan Godean Mandiri	Moyudan, Sumberahayu	54 Unit	0 Unit

Sumber: DPUPKP Sleman

perumahan MBR. Ada yang datang ke kami kami juga untuk komplain," kata Agung saat dihubungi, Sabtu (22/3).

Berbagai kebijakan mengenai perumahan bersubsidi berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Kabupaten Sleman hanya menjadi lokasi pembangunan perumahan tersebut. Koordinasi dilakukan bersama Pemkab Sleman.

Perumahan bersubsidi dijual murah agar MBR dapat mengakses hunian tersebut. Meski harga satu unit murah, kata Agung kualitas bangunan dan PSU harus bagus atau sesuai standar. Rata-rata luas rumah bersubsidi sekitar 60 meter persegi.

"Ke depan apabila ada acara

dengan Pemerintah Pusat, kami akan menyampaikan ihwal PSU di perumahan bersubsidi," katanya.

Lebih jauh, Agung mengatakan pembangunan perumahan bersubsidi kemungkinan masih dilakukan. Ada pengembang yang telah berkonsultasi ke DPUPKP Sleman. Dalam suatu acara bersama Pemerintah Pusat, ada juga pengembang yang berniat membangun di Bumi Sembada.

Hanya, kendala pembangunan rumah bersubsidi saat ini adalah harga tanah yang tinggi. Padahal, agar MBR bisa mengakses satu unit rumah seharga Rp166 juta, paling tidak harga tanah harus Rp1 juta. Lebih dari itu, pengembang akan kesulitan menyediakan rumah layak

dengan harga murah.

Pembangunan rumah bersubsidi pada awalnya dilaksanakan di Sleman bagian barat dan Sleman bagian timur yang masih memiliki tanah murah di perdesaan. Namun, proyek Tol Jogja - Solo dengan dua exit tol yang berada di dua wilayah tersebut memicu kenaikan harga tanah.

"Meski menggarap perumahan bersubsidi, pengembang tetap ingin mendapat keuntungan. Mereka punya *business plan*, luas rumah, jumlah unit yang bisa disediakan. Jadi kalau harga tanah mahal, mereka kesulitan. Kalau memaksa, kualitas perumahan malah bisa dikorbankan," ucapnya.

Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, mengatakan masyarakat yang ingin mengakses perumahan bersubsidi dapat langsung menghubungi pengembang perumahan tersebut.

"Silakan kepada masyarakat kalau ingin mengakses perumahan bersubsidi, apabila masih tersedia, bisa langsung ke pengembang," kata Suwarsono.

(Andreas Yuda Pramono)